

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Engrith Grafelia Leunupun¹; Piter Heumasse²

Program Studi Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura
Jln. Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya
E-mail : leunupun@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This research aims to analyze the influence of Regional Original Income and Special Allocation Funds on Capital Expenditures. This research is a type of quantitative research with the data used is secondary data in the form of reports on the realization of the regional government budget of Southwest Maluku Regency from 2016-2022. Data testing was carried out using SPSS to test the hypothesis. The results obtained from this test are that local original income does not have a significant and partial effect on capital expenditure and special allocation funds partially and significantly have an effect on capital expenditure, and simultaneously there is an influence between local original income and special allocation funds on capital expenditure.

Keywords: *Regional Original Income, Special Allocation Funds, Capital Expenditures*

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa dari segi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Berikut ini adalah tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kurun waktu enam tahun terakhir:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
1	2017	Rp 995.609.326.719	Rp 49.763.939.793	Rp 231.824.219.516	Rp 333.764.881.072
2	2018	Rp 826.551.006.773	Rp 49.399.756.084	Rp 96.764.184.296	Rp 239.955.993.364
3	2019	Rp 964.269.664.927	Rp 54.506.738.665	Rp 174.454.917.082	Rp 255.804.452.478
4	2020	Rp 869.800.027.151	Rp 38.435.054.580	Rp 136.408.261.237	Rp 222.472.120.242
5	2021	Rp 974.035.409.660	Rp 40.359.731.636	Rp 195.663.290.935	Rp 288.601.353.260
6	2022	Rp 899.199.207.893	Rp 36.637.459.811	Rp 177.492.651.788	Rp 320.251.893.350

Sumber: Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2018 saja yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. DAK terbebesar yaitu pada tahun 2017 dan yang terendah yaitu pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada belanja modal dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan maupun penurunan. Belanja modal terbanyak terjadi di tahun 2017 dan yang terendah di tahun 2020. Menurut Bugis (2015) kondisi ideal kontribusi PAD harus di atas 50% dari total penerimaan APBD. Namun kenyataan yang terjadi besarnya PAD Kabupaten Maluku Barat Daya belum mencapai 50% dari total penerimaan APBD. Hal ini mencerminkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga tujuan dari dana alokasi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah atau daerah dengan

daerah belum sepenuhnya tercapai dengan menggali sumber-sumber penerimaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Periode 2016-2022 dan diuji menggunakan *software* SPSS.

HASIL

Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kenormalan data digunakan metode *one sample kolmogorov-smirnov test*. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh $> 5\%$, maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.200 lebih besar dari 5%. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Terjadinya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *varians inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* dibawah angka 0.10 atau nilai VIF di atas angka 10 maka disimpulkan telah terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak perlu

dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak ada gejala autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.297 lebih besar dari 5%. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi.

Hasil Pengujian Parsial (Uji-t)

Variabel	Signifikan
Pendapatan Asli Daerah	0.638
Dana Alokasi Khusus	0.000

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian yang didapatkan, dimana nilai signifikan 0.638 lebih besar dari 0.05. Sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05.

Hasil Pengujian Simultan (Uji-f)

Variabel	Signifikan
Regresi	0.000

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian maka didapatkan hasil secara bersamaan terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Hasil Pengujian Simultan (Uji-f)

Variabel	Adjusted R Square
Model	0.631

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah 0.631 (63.1%), sedangkan

0.369 (36,9%) sisahnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Model Regresi

Variabel	Siginifikan
Belanja Modal	39906572980
Pendapatan Asli Daerah	-0.333
Dana Alokasi Khusus	0.783

Sumber : data primer diolah 2023

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai siginifakansi pendapatan asli daerah sebesar $0.638 >$ dari nilai alfa yang ditentukan yaitu 0.05, itu berarti hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (2017) dan Bukit & Alhadheri (2020) yang megatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Hal ini memberikan indikasi kalau alokasi belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pendapatan asli daerah yang diperoleh. PAD yang tinggi atau

rendah tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Jumlah pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan, dan jumlah pendapatan asli daerah yang diterima setiap tahunnya tidak terlalu signifikan dengan besarnya belanja modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya harus lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Menurut Ikhwan (2017) PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yovita (2011) mengatakan bahwa daerah dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai siginifakansi dana alokasi khusus sebesar $0.000 <$ dari nilai alfa yang ditetntukan yaitu 0.05, itu berarti hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Hairiyah, dkk (2017) yang mengatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa Kabupaten yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil penelitian ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana alokasi khusus. Jumlah dana alokasi khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya setiap tahunnya berada dikisaran rata-rata 100M sampai dengan lebih dari 200M, jumlah ini lebih sedikit dari belanja modal yang dikeluarkan Pemda Maluku Barat Daya yakni kisaran lebih dari 200M sampai dengan 300M.

Pendapatan daerah yang berupa dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah (Hairiyah, dkk, 2017). Belanja Modal Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, asset tetap lainnya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal membawa dampak terhadap pengambilan keputusan dalam mengeluarkan anggaran daerah. Ketika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dan dana

alokasi khusus maka akan meningkatkan pula belanja modal.

Hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal mengisyaratkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang lain akan berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa menjadi daerah yang tidak tergantung terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Sukriy & Abdul, Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (2) : 17-32
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8 (1) : 1450 - 1465.
- Agung, Nugroho, 2005. Strategi Jitu memilih Metode statistic Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta: Andi.
- Ahmad, Waluya Jati. 2006. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur), *Jurnal Humanity*, 2: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013*
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. 2014. Analisis Dana Transfer pada

- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal EMBA. Vol.2, No.1 : 646-655.
- Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.
- Santoso, Imam & I Wayan Suparta. 2015. Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.4 No.2 : 135-165.
- Priatna, Husaeri & Jaya Purwadinata. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 3, No. 2.
- Rinaldi, Abel. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatra Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Samad, R. Putra & Rita Yani Iyan. 2013. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.3 No.8 : 103-122.